

SKRIPSI

PENGARUH PAJAK DAERAH TINGKAT II DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2024

Oleh :

**WINDA NUR AFRITA
NPM. 2003031051**



**Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TINGKAT II DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI
UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2024**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

WINDA NUR AFRITA
NPM.2003031051

Dosen Pengampu : Carmidah, M.Ak

Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringnulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : isba@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Winda Nur Afrita
NPM : 2003031051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH TINGKAT II DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA LOKASI UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2024

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 10 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH TINGKAT II DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA LOKASI UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2024
Nama : Winda Nur Afrita
NPM : 2003031051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Metro, 10 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296 Website: uin.metroweb.ac.id E-mail: uin@uinmetroweb.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : b-0017/LIn.36.2/D/PP.00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul: PENGARUH PAJAK DAERAH TINGKAT II DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2024, disusun Oleh: Winda Nur Afrita, NPM: 2003031051, Prodi: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/23 Desember 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Carmidah, M.Ak.

(.....)

Pengaji I : Era Yudistira, M.Ak.

(.....)

Pengaji II : Atika Lusi Tania, M.Acc.

(.....)

Sekretaris : Witantri Dwi Swandini, M.Ak.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TINGKAT II DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2024

Oleh:

**WINDA NUR AFRITA
NPM 2003031051**

Realisasi penerimaan pajak daerah tingkat II dan pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024 cenderung stabil atau bahkan mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Lima daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar serta ketergantungan pada dana alokasi umum yang mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui portal DJPK KemenKeu dengan analisis regresi data panel dengan kriteria sampel lima daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2017-2024.

Berdasarkan analisis data menggunakan *E-Views 13*, menunjukan bahwa pajak daerah tingkat II dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap dana alokasi umum di Provinsi Lampung selama periode 2017-2024. Hal ini menunjukan bahwa pajak daerah tingkat II dan pendapatan asli daerah mempengaruhi besaran nilai dana alokasi umum yang diterima.

Kata Kunci: *Pajak Daerah Tingkat II, PAD, dan DAU*

ORSINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Nur Afrita

NPM : 2003031051

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Desember 2025
Peneliti



Winda Nur Afrita
NPM. 2003031051

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْأُعْسَرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” – QS. Al-Insyirah:6
Ayat ini mengandung makna bahwa setiap tantangan akan disertai jalan keluar.

“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya”

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan ucapan terimakasih melalui skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Hermili dan Ibunda Endang Supatmi tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan demi terselesaiannya skripsi ini. Berkat cinta dan kasih beliau penulis mendapatkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakaku Meilinda Anjarsari dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa.
3. Ibu Carmidah, M.Ak yang telah membimbing dan mengarahkan penelitian ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Prodi AKS, dan sahabat-sahabati PMII yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Tingkat II dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024” dengan baik.

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di UIN Jurai Siwo Lampung.

Peneliti menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan dalam penyusunan proposal ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Atika Lusi Tania, M.Acc., AK., Ca., A-cpa, selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Syariah.
4. Reonika Puspita Sari, M. E. Sy, selaku pembimbing akademik.
5. Carmidah, M. Ak, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan serta arahan yang sangat berharga kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua orang tua, Bapak Hermili dan Ibu Endang Supatmi yang telah memberikan support serta doa untuk kesuksesan peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat menghasilkan penelitian ini jadi lebih baik. Penyusun harap semoga proposal ini dapat berguna bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Metro, 22 Desember 20245
Peneliti



Winda Nur Afrita
NPM. 2003031051

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak Daerah	11
1. Pengertian Pajak Daerah	11
2. Fungsi Pajak Daerah	12
3. Macam-Macam Pajak.....	13
B. Pendapatan Asli Daerah	16
C. Dana Alokasi Umum.....	18
D. Kerangka Konseptual	19
E. Hipotesis Penelitian.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	24
B. Definisi Operasional Variabel.....	25
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
2. Hasil Penelitian	38
3. Regresi Linier Berganda	43
4. Uji Hipotesis	45
B. Pembahasan.....	48
1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum	48
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum.....	49
3. Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR REWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi PAD Tertinggi di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024 (Dalam Milyaran)	2
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024 (Dalam Milyaran).....	3
Tabel 1.3 Realisasi Dana Alokasi Umum di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024 (Dalam Milyaran).....	3
Tabel 1.3 Penelitian Relevan	7
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	25
Tabel 3.1 Daftar 5 Wilayah Dengan PAD Tertinggi di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024	27
Tabel 4.1 Tabulasi Data E-Views	37
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov	39
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	43
Tabel 4.6 Hasil Uji T	45
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi (R ²)	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam membiayai berbagai macam kegiatan operasionalnya, hal tersebut yang menimbulkan terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari dana APBN. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mentransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Sumber daya alam. Hal ini berarti pemberian transfer seharusnya mampu mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelanjaan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan kemandirian daerah (dalam konteks negara indonesia, transfer dapat diidentikkan dengan DAU dan kemandirian daerah ditunjukkan dengan PAD). Dikutip dari CNN Indonesia (2021), Badan Pemeriksa Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2020 tidak ada satu pun kota maupun kabupaten yang dikategorikan sangat mandiri.

Tabel 1.1
Realisasi Dana Alokasi Umum di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung Tahun 2017-2024 (Dalam Milyaran)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	1034,73	1034,73	1114,93	1019,03	1002,21	1002,21	1085,65	1131,09
Lampung Selatan	1013,33	1019,21	1054,04	966,26	947,73	947,73	1023,51	1111,44
Metro	455,73	455,73	476,74	435,05	427,59	427,59	446,00	465,02
Lampung Tengah	1317,68	1319,48	1385,75	1248,69	1233,41	1233,94	1335,97	1445,83
Lampung Timur	1062,56	1069,17	1106,58	1007,07	996,51	996,89	1077,27	1168,26

Sumber: <https://djkpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

Pemerintah pusat menyalurkan dana kepada pemerintah daerah yang dikenal sebagai dana perimbangan. Menurut Subekan, dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika pendapatan asli daerah tidak cukup untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan pemerintah daerah, dana alokasi umum diharapkan dapat menutupi kesenjangan sampai batas tertentu. Namun, kekurangan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dikompensasi, karena formula alokasi yang menentukan jumlah dana alokasi umum yang dibayarkan kepada semua pemerintah daerah telah ditentukan sebelumnya dalam anggaran nasionalnya, APBN.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi¹. Rentang tahun 2017-2024 daerah dengan menempati pendapatan asli daerah tertinggi di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dengan rata-rata PAD sebesar 599,66M, Kabupaten Lampung Selatan dengan rata-rata PAD sebesar 255,34M, Kota Metro sebesar 222,21M, Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata sebesar 189,08M, dan yang urutan kelima daerah dengan PAD tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Timur dengan rata-rata PAD sebesar 140,30M.

Tabel 1.2
**Realisasi PAD Tertinggi di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung Tahun 2017-2024 (Dalam Milyaran)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	612,81	550,28	627,30	537,54	564,29	645,97	636,99	621,28
Lampung Selatan	206,06	215,41	275,46	275,14	295,72	310,58	319,70	144,68
Metro	138,84	132,20	176,20	221,65	273,85	239,84	262,96	332,11
Lampung Tengah	147,05	165,41	193,63	179,88	234,89	212,02	210,81	168,97
Lampung Timur	111,89	125,04	147,53	157,81	158,38	195,57	181,49	44,66

Sumber: <https://djkpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, meskipun pendapatan asli daerah yang diperoleh mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2024. Kabupaten/Kota tersebut termasuk 5 daerah wilayah di kabupaten/kota dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2024. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan realisasi PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mencerminkan pemungutan pajak di daerah tersebut dilakukan secara efektif sehingga kontribusi sektor pajak daerah menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan PAD.

¹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

Tabel 1.3
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung Tahun 2017-2024 (Dalam Milyaran)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	373,76	398,45	480,42	410,46	416,92	498,95	498,40	555,82
Lampung Selatan	78,13	91,96	117,85	116,02	135,10	160,86	155,83	190,40
Metro	18,21	21,73	27,21	28,85	33,11	36,72	38,45	41,39
Lampung Tengah	63,60	79,71	92,62	85,42	100,69	119,66	118,36	136,40
Lampung Timur	39,72	53,21	62,33	60,59	66,99	75,05	77,98	83,55

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Dilihat dari data di atas, menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya, sehingga dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sektor yang mampu berkembang guna meningkatkan dan memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada perkembangannya, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah justru tidak selalu mengalami peningkatan, tetapi juga mengalami penurunan. Pemerintah Daerah justru lebih menggantungkan diri pada dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat mendorong pemerintah daerah melakukan Belanja Daerah lebih besar. Kebijakan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Nanga (dalam Adi dan Ekaristi, 2009:7) justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan mendapatkan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PAD). Daerah tentu saja lebih memilih mengupayakan perolehan

Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar daripada bekerja keras agar terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mengakibatkan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian pada lima kabupaten/kota dengan PAD tertinggi sampel di Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2017-2024. Apakah Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Tingkat II dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang tertuang pada latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat 5 daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Lampung selama tahun 2017-2024.
2. Beberapa komponen penting dari APBD seperti pajak daerah, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2024.
3. Kontribusi pajak daerah tingkat II dan pendapatan asli daerah belum tentu memberikan pengaruh positif terhadap jumlah dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa masalah yang timbul. Mengingat adanya keterbatasan dari sisi waktu, biaya, dan cakupan penelitian, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup pembahasan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada pengaruh kontribusi pajak daerah tingkat II dan pendapatan asli daerah terhadap dana alokasi umum yang dibatasi pada lima kabupaten/kota dengan PAD tertinggi di Provinsi Lampung selama periode 2017-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah tingkat II terhadap DAU?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap DAU?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah tingkat II dan pendapatan asli daerah terhadap DAU secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah tingkat II terhadap DAU
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap DAU

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah Tingkat II dan pendapatan asli daerah terhadap DAU secara simultan

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dianalisis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pajak daerah tingkat II, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pada lima daerah dengan PAD tertinggi untuk mengevaluasi kinerja dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dapat digunakan sebagai acuan penelitian karena landasan teorinya menjadi lebih jelas, valid, dan memiliki hipotesis penelitian yang membuat penelitian penting.

Tabel 1.4
Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Dimas Aryo Dewantoro: Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ²	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen pajak daerah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen retribusi daerah, variabel dependen kemandirian keuangan daerah	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. Artinya ketika perolehan pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. 2. Retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. Artinya, ketika perolehan retribusi daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat. 3. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh

² Dimas Ariyo Dewantoro, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” 1, no. 2 (2022): 38–47.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. artinya ketika perolehan pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.
2.	Winarni Rahayu, Asep Syamsu Diyar, Tri Priyatmo: Pengaruh Pajak Daerah, Dbh, Dan Dak terhadap Kemandirian Keuangan pemda di Provinsi Riau ³	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen pajak daerah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen DBH dan DAK, variabel dependen kemandirian keuangan daerah, lokasi penelitian,	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak daerah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemandirian keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. 2. DBH memiliki pengaruh yang kuat tetapi negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau 3. Alokasi DAK berbanding terbalik dengan kemandirian suatu daerah. Hal ini

³ Pengaruh Pajak Daerah et al., "Pengaruh Pajak Daerah, Dbh, Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda Di Provinsi Riau 1,2,3" 5 (2024): 38–56.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				<p>menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Riau masih sangat membutuhkan alokasi dana transfer baik transfer dari APBN maupun APBD.</p> <p>4. Secara bersama-sama Pajak Daerah, DBH, dan DAK memiliki pengaruh kuat terhadap kemandirian keuangan pada Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.</p>
3	Dian Novianti: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung ⁴	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen kemandirian keuangan daerah, lokasi penelitian, dan tahun penelitian	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
4.	Eve Ida Malau, Eka Pratiwi Septania Parapat: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah variabel independen pendapatan asli	Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah variabel independen belanja modal, variabel	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan

⁴ Dian Novianti, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung” 2, no. 3 (2022): 244–50.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Kemandirian Keuangan Daerah ⁵	daerah	dependen kemandirian keuangan daerah	daerah. 2. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

⁵ Eve Ida Malau, Eka Pratiwi, and Septania Parapat, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal” 3 (2020): 332–37, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi¹. Desentralisasi adalah pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dapat disimpulkan bahwa DAU dialokasikan untuk memastikan bahwa kemampuan keuangan masing-masing daerah setara, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang sebanding dalam mengelola urusan pemerintahan dan menyediakan layanan publik.

Pengeluaran DAU harus minimal sebesar 26% dari PDN (Pendapatan Dalam Negeri) Netto, PDN Netto adalah selisih pendapatan dalam negeri dengan bagi hasil dari pusat ke daerah. Perhitungan alokasi diatas sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah².

¹ [UU]. (2004). Undang-Undang No 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

² Angreany, “Erhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di,” n.d., 2.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pemerintah daerah menerima banyak tanggung jawab dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah sektor ekonomi regional. Otoritas untuk mengelola keuangan untuk membiayai penyelenggataan otonomi sama dengan otoritas untuk menangani masalah rumah tangga pemerintahan. Salah satu bentuk wewenang yang diberikan kepadanya adalah pengaturan pendapatan dan pengeluaran daerah. Salah satu sumber pendapatannya yang terbesar daerah yaitu pajak daerah, di mana ditetapkan dan dibayar secara langsung oleh pemerintah daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan.

Hasil pajak daerah yaitu uang diterima berasal pajak yang kemudian diatur pemerintah daerah, termasuk pemerintah tingkat I ataupun pemerintah tingkat II. Pengeluaran daerah, baik pendapatan maupun pengeluaran, akan dicatat dan dicantumkan pada rencana dana dan pendapatan belanja daerah, juga dikenal sebagai APBD.

Berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merujuk pada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi terhadap pemerintah daerah sejalan atas ketetapan undang-undang³. Pembayaran tersebut tidak memperoleh penggantian dengan cara langsung dan dipergunakan guna memenuhi kebutuhan daerahnya serta meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan

³ [UU]. (2009). Undang-Undang No 28 Tentang Pajak Daerah

2. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memainkan peran penting dalam dua fungsi, yaitu budgetair dan regulerend. Dalam fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah membantu mengumpulkan anggaran yang berasal penduduk guna membiayai peningkatan daerah. Dalam fungsi regulerend, pajak daerah berfungsi menjadi jalan agar tercapainya suatu tujuan daerah. Pada situasi seperti ini, pajak daerah dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat pembelian barang atau jasa tertentu. Secara umum, tugas pajak lokal dibagi menjadi 4 kategori, termasuk⁴:

a. Fungsi anggaran

Pengeluaran rutin daerah termasuk belanja pegawai pengadaan barang dan jasa, pembangunan, pemeliharaan, dan tabungan pemerintah didanai oleh pajak daerah, ialah termasuk dalam pendapatan asli daerah.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengontrol perkembangan ekonomi dan masalah ekonomi dengan kebijaksanaan pajak daerah.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang mempermudah pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga jasa dan barang, yang di mana berpotensi meminimalisir inflasi.

⁴ Ayu Furi Puspita, Dewi Pusposari, and M Khoiru, *Lokal Taxing Power: Potensi, Pemeriksaan, Dan Penagihan* (Universitas Brawijaya Press, 2023).

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pajak daerah yang terdapat dipergunakan guna membiayai seluruh urgensi general, meliputi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi disparitas pendapatan.

3. Macam-Macam Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai perubahan dari UU No. 34 Tahun 2000, terdapat beberapa macam pajak daerah, antara lain⁵:

- a) Pajak daerah tingkat I yang mencakup pajak rokok, air permukaan, biaya balik nama, kendaraan dan bahan bakar.
- b) Pajak daerah tingkat II yakni pajak yang didapatkan daerah, misalnya hotel, hiburan, restoran, penerangan, reklame, mineral, parkir, air tanah, peternakan, dan pajak bumi dan bangunan.

Berikut ini macam pajak yang diperoleh dari Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Pajak Restoran

Dari ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan pada layanan yang disediakan oleh restoran, seperti rumah makan, bar, kantin, kios, kafe, dan sejenisnya, termasuk layanan katering, adalah dengan besaran 10%. Besaran pokok pajak yang wajib dibayarkan oleh restoran dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak, yakni total uang tunai yang diterima atau diharapkan diterima oleh restoran, yakni tarif pajak dengan besaran 10%.

⁵ [UU]. (2009). Undang-Undang No 28 Tentang Pajak Daerah

2. Pajak Hotel

Berlandaskan dengan UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak restoran yaitu 10%, ini dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pelanggan, seperti ruang pertemuan, fasilitas olahraga, dan hiburan.

3. Pajak Hiburan

Berbagai macam pertunjukan, aktivitas, permainan, maupun penonton yang dinikmati secara gratis disebut hiburan. Layanan hiburan berbayar dikenakan pajak hiburan. dipublikasikan di website Jakarta.Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh go.id sebagai berikut: pagelaran kesenian, busana, tari, maupun musik yang kelas lokal atau daerah tidak dikenakan pajak; musik kelas nasional, tari, busana, pagelaran seni terkena pajak 5%; dan musik kelas internasional, tari, busana, dan pagelaran kesenian terkena pajak 15% .

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah dana yang wajib dibayarkan untuk memperoleh lisensi periklanan. Jika Anda tidak membayar pajak iklan, bersiaplah untuk menghapus papan reklame atau spanduk Anda. Berdasarkan UU HKPD, Peraturan daerah menetapkan nilai sewa reklame yang disebutkan pada Ayat 3. Masing-masing wilayah mempunyai tarif yang tidak sama, namun pajak paling tinggi untuk reklame sebanyak 25%.

5. Pajak Parkir

Pemerintah daerah mengenakan pajak parkir kepada pengusaha atau instansi pengelola parkir seperti gedung, hotel, mal, atau area lain

yang bertanggung jawab atas pengawasan parkir. Tidak sama dengan retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pengemudi kendaraan bermotor terhadap penjaga atau pengelola parkirnya, yang termasuk dalam kategori retribusi. Sebagian besar dana yang terkumpul dari retribusi ini digunakan oleh petugas parkir untuk memantau kendaraan yang parkir.

Pelayanan parkir, khususnya penyediaan tempat parkir, dimasukkan dalam sistem pajak daerah sebagai bagian dari pajak dan biaya daerah. Namun, karena layanan parkir termasuk dalam pajak pusat, layanan ini dipungut tarif PPN 11 persen saat ini. Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD menyebut bahwa tarif pajak parkir diatur maksimal dengan besaran 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir yaitu angka bayar yang harusnya dilakukan pembayaran terhadap penyelenggara tempat parkirnya.

6. Pajak Penerangan Jalan

PPJ merujuk pada pajak dari digunakananya listrik dibuat mandiri atau dibeli melalui sumber lainnya.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak air bawah tanah dipungut dari orang maupun organisasi yang memperoleh maupun memanfaatkan air tanah. Air bawah tanah yaitu air di bawah lapisan batuan atau tanah. Tarif pajak adalah 20%.

8. Pajak Bumi dan Bangunan

Mengacu Pasal 6 ayat (3) UU PBB, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diberi wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pedesaan dan kota (PBB-P2), serta untuk sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3).

UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menetapkan tarif $0.5\% \times \text{NJKP}$.

9. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Pembayaran BPHTB digunakan untuk membeli tanah dan bangunan. Hak atas tanah mencakup hak atas tanah yang diatur pada UU Pokok Pertanian No.5 Tahun 1960, Undang-Undang Perumahan No. 16 dan aturan perundangan lainnya. Hak atas tanah ini diperoleh melalui proses hukum yang disebut perolehan hak. Peraturan daerah menetapkan tarif bea atas hak atas tanah dan bangunan; namun, Pasal 88 UU No.28 tahun 2009 menyatakan tarif ini hanya boleh mencapai 5%, atau lima persen.

C. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.²⁶ Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”⁶.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerahnya sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dengan

⁶ Zuni Miftakhur and Lailatur, *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD*, n.d.

tujuan untuk memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah sebagai bagian dari desentralisasi. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah harus mengakses sumber daya keuangan melalui PAD.

PAD terdiri dari semua penerimaan daerah dari sumber daya dalam wilayahnya yang dipungut menurut peraturan daerah sesuai. PAD mengambil porsi yang semakin besar dalam keuangan daerah, sehingga menjadi penopang utama dalam menjalankan program pemerintahan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus mempertimbangkan apa yang dapat dimasukkan ke dalam penerimanya dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan memahami pentingnya PAD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena menunjukkan seberapa banyak suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kurang mampunya daerah mengelola sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatannya. Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan terdapat sumber-sumber PAD, yaitu⁷:

⁷ Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pungutannya dalam Peraturan Daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak restoran, dan sebagainya.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Contoh: retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah yang sah. Contoh: pendapatan bunga, jasa giro, dan sebagainya.

D. Kerangka Konseptual

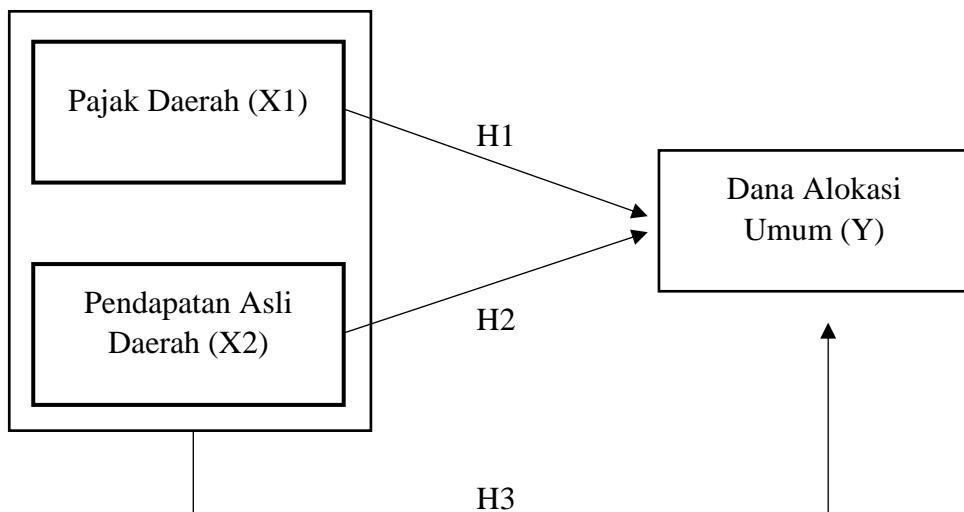
Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran dari hubungan antara variabel yang diteliti dalam penelitian⁸, yaitu Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan PAD Terhadap DAU. Penelitian ini menggunakan model hubungan antara variabel bebas yaitu pajak daerah (X1), dan pendapatan asli daerah (X2) dan variabel terikat yaitu Dana Alokasi Umum (Y).

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh atau tidaknya terhadap dana alokasi umum.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2020).

Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris⁹. Hipotesis dapat berbentuk hipotesis nol atau hipotesis alternatif, dan dapat dibuat berdasarkan landasan teoretis dan praktis. Hipotesis dapat menentukan arah pikiran peneliti dalam mengupas fakta dan membantu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi.

Berikut hipotesis pada penelitian yang ingin diteliti:

1. Pengaruh Pajak Daerah Tingkat II Terhadap Dana Alokasi Umum

Pengaruh pajak daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat tidak langsung; semakin besar pajak daerah yang berhasil dihimpun, semakin besar potensi pendapatan asli daerah (PAD) daerah

⁹ Sugiono.

tersebut, yang kemudian dapat mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari APBN seperti DAU untuk mendanai kebutuhan daerah dan pemerataan keuangan, sehingga DAU bisa lebih difokuskan untuk tujuan-tujuan lain.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. Semakin besar PAD yang dihasilkan dari pajak daerah, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahannya sendiri.

H1: Pajak Daerah Berpengaruh pada Dana Alokasi Umum

2. Pengaruh PAD Terhadap Dana Alokasi Umum

PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara tidak langsung memengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) karena DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, sehingga daerah dengan PAD rendah akan menerima DAU yang lebih besar untuk mengatasi ketimpangan fiskal, sementara daerah dengan PAD tinggi cenderung mendapat DAU lebih kecil atau bahkan tidak sama sekali jika PAD-nya sudah mencukupi. Dengan demikian, semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin kecil potensi penerimaan DAU yang akan diterima karena daerah tersebut dianggap sudah lebih mandiri secara fiskal.

Salah satu tujuan utama DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Daerah yang memiliki PAD rendah dan tingkat kemiskinan tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar sebagai bentuk dukungan. Daerah dengan PAD

yang tinggi dianggap lebih mampu membiayai sendiri belanja dan program pembangunan daerah. Hal ini mengurangi ketergantungan mereka terhadap dana transfer dari pusat, termasuk DAU.

H2: PAD Berpengaruh Pada Dana Alokasi Umum

3. Pengaruh Pajak Daerah Tingkat II dan PAD Terhadap Dana Alokasi Umum

Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) umumnya tidak berpengaruh langsung terhadap jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), karena DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah, bukan dipengaruhi oleh penerimaan daerah. Namun, PAD yang besar dapat berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada DAU untuk membiayai pembangunan, dan dalam beberapa kasus dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah yang didukung oleh DAU.

DAU adalah bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah. Tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, terutama untuk pembiayaan pegawai dan pembangunan prasarana, serta untuk menyetarakan kemampuan keuangan antar-daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin besar kemampuannya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan tanpa

harus bergantung sepenuhnya pada DAU. Peningkatan atau penurunan PAD tidak secara otomatis mengubah jumlah DAU yang diterima suatu daerah. Dana DAU ditentukan berdasarkan formula dan alokasi dari pemerintah pusat, bukan berdasarkan PAD daerah.

H3: Pajak Daerah dan PAD berpengaruh Terhadap DAU

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rencana penelitian untuk menguraikan sumber-sumber dari jenis informasi yang akan digunakan dari beberapa variabel data yang akan diselidiki pada tahap berikutnya, dengan gambaran pemikiran struktural yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan untuk memudahkan proses penelitian¹. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan².

Jenis dan sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dengan demikian penelitian ini akan mencari ada atau tidaknya pengaruh kontribusi Pajak Daerah Tingkat II dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum.

¹M P Fachri Firdaus et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

B. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah proses menentukan cara atau metode untuk mengukur atau mengamati variabel tertentu agar dapat dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan³. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel-variabel tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

NO	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Paramater	Skala
1	Bebas	Pajak Daerah	Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, terutang oleh orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.	Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017-2024	Rasio
2	Bebas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi pajak daerah, dan hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2024	Rasio

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 103.

3	Terikat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan, komponen dari APBD, dana APBN yang tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.	Realisasi penerimaan dana alokasi umum tahun 2017-2024	Rasio
---	---------	-------------------------	---	--	-------

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi merujuk pada suatu area yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis, dan dari situ ditarik kesimpulan⁴. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti berjumlah 60, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah tingkat II, realisasi pendapatan asli daerah tingkat II, dan realisasi dana alokasi umum di provinsi Lampung tahun 2017-2024.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁵. Maka teknik pengambilan sampel yang dianggap paling cocok adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

yang ditetapkan oleh peneliti⁶. Kriteria tersebut menggunakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2024.

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti menentukan sampel sebanyak 5 daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2024 dan jumlah data pada penelitian ini adalah sebanyak 40.

Tabel 3.1
Daftar 5 Wilayah Dengan PAD Tertinggi di Provinsi Lampung
Tahun 2017-2024

No	Kota/Kabupaten
1	Kota Bandar Lampung
2	Kabupaten Lampung Selatan
3	Kota Metro
4	Kabupaten Lampung Tengah
5	Kabupaten Lampung Timur

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan data primer dan data sekunder dari suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang penting dilakukan, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan⁷.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2020.

⁷ Sofyan Siregar, *Statistik Parameter Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari informasi tentang data-data variabel terkait yang terdiri dari buku, catatan, surat kabar, transkrip, buku tahunan, notulen rapat, agenda, majalah, prasasti, legger, dan lain-lain⁸.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan. Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang sedang diamati dalam konteks penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Koefisien Determinasi, Uji Kelayakan Model (Uji F) dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

1. Statistik Dekriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang subjek diteliti

⁸ Dan M Ali Sodik Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

melalui data sampel atau data populasi.⁹ Penyediaan data yang digunakan dalam statistik deskriptif ini tentang nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

2. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung.

Model analisis regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Dana Alokasi Umum

α = Bilangan Konstan

$\beta_1; \beta_2;$ = koefisien regresi masing-masing X_1

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

e = error

⁹Luh Titi Handayani and Asmuji, *Statistik Deskriptif* (UM Jember Press, 2023).

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi dapat digunakan atau tidak.¹⁰ Ada empat asumsi yang diuji yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.¹¹

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritis.¹²

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang dapat dikatakan baik ialah jika variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal. Data penelitian yang telah terdistribusi normal dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik probability plot. Selain probability plot penelitian ini juga menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov sebagai berikut:

- 1) Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

¹⁰Dianda Pianda, *Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018).

¹¹Pianda.

¹²Pianda.

b) Uji Multikolineritas

Uji *Multikolineritas* adalah dengan meregresikan setiap variabel independen dengan variabel dependen lainnya dengan tujuan untuk mengetahui nilai koefisien r^2 untuk setiap variabel yang diregresikan.¹³ Berdasarkan pendapat Ghozali, tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen)¹⁴. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas terjadi korelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal, dimana variabel ortogonal merupakan variabel bebas (independen) yang nilai korelasi antar variabel bebas (independen) sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas atau tidak dalam model regresi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan melihat nilai Tolerance untuk mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang mana tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff umum yang dipakai untuk menunjukkan terjadinya multikolinieritas ialah nilai Tolerance > 0,10.
- 2) Dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (dikarenakan $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff umum yang dipakai untuk menunjukkan terjadinya multikolinieritas ialah nilai VIF < 10.

¹³Pianda.

¹⁴Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Undip, 2018).

c) Uji Autokorelasi

Menurut Priyastama, autokorelasi merupakan terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual dengan periode sebelumnya ($t-1$)¹⁵. Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang baik ialah yang tidak terdapat autokorelasi. Penelitian ini menggunakan metode Run Test sebagai indikator.

Uji Run digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hipotesis dari Uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Nilai Sig > 0,05, residual random (acak),

H_a : Nilai Sig < 0,05, residual tidak random.

d) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya¹⁶. Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana variance dari residual satu pengamatan ke 48 pengamatan lainnya tetap. Dalam mendekripsi terjadi atau tidak heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot dengan pengambilan keputusan:

¹⁵ Priastama, *Buku Sakti Kuasai SPSS* (Statr Up, 2017).

¹⁶ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program IBM SPSS 25*.

- 1) Jika grafik scatterplot terdapat atau membentuk pola tertentu seperti titik-titik beraturan yang membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika grafik scatterplot tidak terdapat atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji parsial (uji t) menurut Priyatno (2017), digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) berpengaruh secara signifikan atau tidak dengan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 (dua) sisi¹⁷. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ 50 signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$. Dikatakan berpengaruh positif jika nilai t hitung positif. Kriteria pengujian uji t sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dengan nilai $sig > 0,05$ maka disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan nilai $sig < 0,05$ maka disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

b. Uji f

Menurut Priyatno (2017), uji simultan atau dikenal dengan uji F ialah uji yang dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh secara simultan atau bersamasama antara beberapa variabel independen

¹⁷ Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS* (ANDI, 2017).

terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05¹⁸. Untuk menentukan nilai F tabel dapat dilihat dalam tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan df 1 ($k-1$) dan df 2 ($n-k$) dimana n merupakan jumlah data dan k merupakan jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian uji F antara lain:

1) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, dengan nilai $sig > 0,05$ maka disimpulkan

H_1 ditolak dan H_0 diterima.

2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan nilai $sig < 0,05$ maka disimpulkan

H_1 diterima dan H_0 ditolak.

c. Uji R2

Menurut Ghazali (2018), koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 (nol) dan 1 (satu)¹⁹. Jika nilai R^2 kecil 51 maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilainya mendekati 1 (satu) maka variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam menguji koefisien determinasi dianjurkan menggunakan nilai Adjusted R^2 . Apabila nilai Adjusted R^2 negatif, maka nilai Adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Jika nilai $R^2 = 1$, maka Adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika $R^2 = 0$ akan bernilai negatif.

¹⁸ Priyatno.

¹⁹ Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung sebuah kemajuan suatu daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memajukan wilayahnya sendiri dengan menunjukkan kemandirian, khususnya dalam hal keuangan. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal, merencanakan, serta melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu campur tangan dalam pengelolaan daerah.

Kemandirian daerah dapat diukur melalui dua indikator, yaitu kemampuan keuangan daerah dan tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Daerah yang mandiri seharusnya dapat menggali sumber pendapatan sendiri serta meminimalkan ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah utama dalam mewujudkan kemandirian daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.

Provinsi Lampung terdiri atas 13 Kabupaten dan 2 Kota, dengan ibu kota berada di Bandar Lampung. Keberadaan banyaknya wilayah administratif ini mencerminkan pemerataan pemerintahan yang baik, sehingga mengurangi pemasatan kekuasaan. Dengan demikian, diharapkan kemandirian daerah di Provinsi Lampung juga tinggi.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan menggali sumber pendapatan baru serta menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. Dengan memaksimalkan potensi penerimaan di kabupaten/kota, kontribusi PAD terhadap APBD dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong kemandirian daerah. Semakin besar proporsi PAD dalam APBD, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan 5 daerah di Provinsi Lampung yang memiliki realisasi PAD tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derah tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui sektor pajak dan sektor lainnya, sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk penelitian yang berhubungan dengan pendapatan daerah

Tabel 4.1
Data Tabulasi Pajak Daerah Tingkat II, PAD, dan DAU
Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

No	Nama Daerah	Tahun	Keterangan		
			Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
1	Bandar Lampung	2017	373.76	612.81	1034.73
		2018	398.45	550.28	1034.73
		2019	480.42	627.3	1114.93
		2020	410.46	537.54	1019.03
		2021	416.92	564.29	1002.21
		2022	498.95	645.97	1002.21
		2023	498.4	636.99	1085.65
		2024	555.82	621.28	1131.09
2	Lampung Selatan	2017	78.13	206.06	1013.33
		2018	91.96	215.41	1019.21
		2019	117.85	275.46	1054.04
		2020	116.02	275.14	966.26
		2021	135.1	295.72	947.73
		2022	160.86	310.58	947.73
		2023	155.83	319.7	1023.51
		2024	190.4	144.68	1111.44
3	Metro	2017	18.21	138.84	455.73
		2018	21.73	132.2	455.73
		2019	27.21	176.2	476.74
		2020	28.85	221.65	435.05
		2021	33.11	273.85	427.59
		2022	36.72	239.84	427.59
		2023	38.45	262.96	446
		2024	41.39	332.11	465.02
4	Lampung Tengah	2017	63.6	147.05	1317.68
		2018	79.71	165.41	1319.48
		2019	92.62	193.63	1385.75
		2020	85.42	179.88	1248.69
		2021	100.69	234.89	1233.41
		2022	119.66	212.02	1233.94
		2023	118.36	210.81	1335.97
		2024	136.4	168.97	1445.83

No	Nama Daerah	Tahun	Keterangan		
			Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
5	Lampung Timur	2017	39.72	111.89	1062.56
		2018	53.21	125.04	1069.17
		2019	62.33	147.53	1106.58
		2020	60.59	157.81	1007.07
		2021	66.99	158.38	996.51
		2022	75.05	195.57	996.89
		2023	77.98	181.49	1077.27
		2024	83.55	44.66	1168.26

Sumber : DJPK, KemenKeu (Data Diolah, 2025)

2. Hasil Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

Terdapat 4 Uji Asumsi Klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas one sample kolmogorov smirnov dan uji normalitas probability prof. Jika nilai p-value > 0,05 maka berdistribusi normal

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov

Keterangan		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		40
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	216.69830570
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.118
	<i>Positive</i>	.051
	<i>Negative</i>	-.118
<i>Test Statistic</i>		.118
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.175 ^c

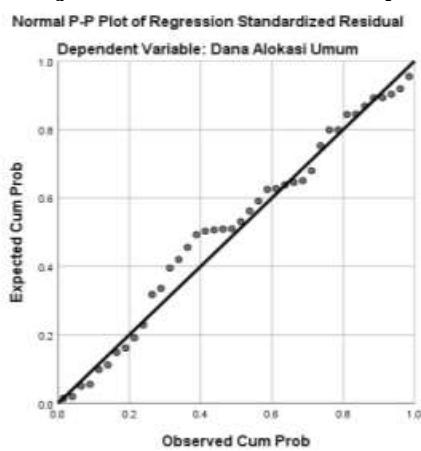
a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

Dari hasil uji normaitas dengan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* pada tabel 4.2 maka dapat diketahui nilai Pajak Daerah (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap variabel Dana Alokasi Umum (Y) adalah $0,175 > 0,05$. Sehingga uji normalitas dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Probability Plot



Berdasarkan gambar 4.1 pada *probability plot*, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi mendekati normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi dengan variabel dependen Dana Alokasi Umum (Y) dapat dinyatakan terpenuhi.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah kondisi dimana terjadi hubungan linear yang tinggi dalam suatu model regresi. Jika variabel independen saling berkorelasi tinggi, maka dapat menyebabkan keridakstabilan estimasi koefisien regresi, serta interpretasi yang bias terhadap pengaruh masing-masing variabel.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Pajak Daerah	.144	6.938
	Pendapatan Asli Daerah	.144	6.938

a. *Dependent Variable*: Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 diketahui bahwa variabel Pajak Daerah (X_1) memiliki nilai VIF sebesar $6,938 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,144 > 0,10$. Demikian pula, variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) menunjukkan nilai VIF sebesar $6,938 < 10$ serta nilai *tolerance* sebesar $0,144 > 0,10$. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu. Penelitian ini menggunakan metode Run Test sebagai indikator.

Uji Run digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hipotesis dari Uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Nilai $Sig > 0,05$, residual random (acak),

H_a : Nilai $Sig < 0,05$, residual tidak random.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	376.66746 ^b
<i>Cases < Test Value</i>	39
<i>Cases >= Test Value</i>	1
<i>Total Cases</i>	40
<i>Number of Runs</i>	3
Z	.000

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

- a. *Mode*
- b. *There are multiple modes. The mode with the largest data value is used.*

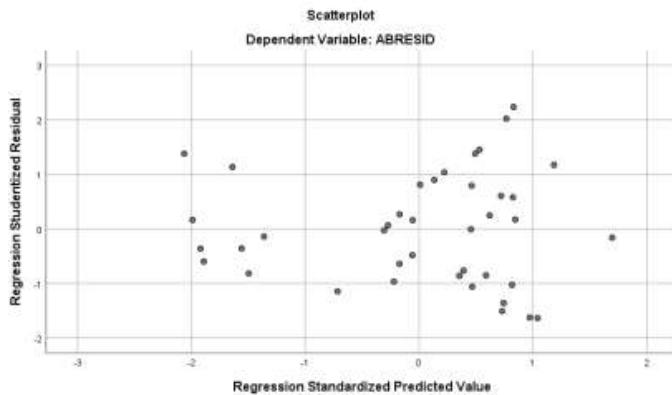
Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang disajikan pada Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Dana Alokasi Umum (Y) adalah sebesar $1,000 > 0,05$. Dengan demikian, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam mendekripsi terjadi atau tidak heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot dengan pengambilan keputusan:

- a. Jika grafik scatterplot terdapat atau membentuk pola tertentu seperti titik-titik beraturan yang membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika grafik scatterplot tidak terdapat atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan tabel 4.2 pada grafik *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur. Pola penyebaran tersebut menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan pada setiap nilai prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant) 1235.082	83.575			14.778	.000
	Pajak Daerah 3.298	.593	1.777		5.563	.000
	Pendapatan Asli Daerah -2.745	.543	-1.614		-5.054	.000

a. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

$$Y = 1235.082 + 3.298X_1 - 2.745X_2$$

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menyatakan bahwa:

- a. Diperoleh nilai α sebesar 1235.082. Nilai ini merupakan nilai konstan atau keadaan pada saat variabel Dana Alokasi Umum (Y) belum dipengaruhi oleh variabel independent yakni Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2). Jika kedua variabel independen tidak ada, maka besarnya Dana Alokasi Umum (Y) yang terjadi adalah sebesar 1235.082.
- b. Diperoleh nilai β_1x_1 sebesar 3.298. Nilai ini memiliki arti bahwa interaksi antara Pajak Daerah (X_1) memiliki koefisien sebesar 3.298 yang menunjukkan bahwa koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang positif antara Pajak Daerah (X_1) terhadap Dana Alokasi Umum (Y). Jika terjadi peningkatan satu unit pada variabel Pajak Daerah (X_1) akan meningkatkan nilai Dana Alokasi Umum (Y) sebesar 3.298.
- c. Diperoleh nilai β_2x_2 sebesar -2.745. Nilai ini memiliki arti bahwa interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (X_2) memiliki koefisien sebesar -2.745 yang menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif yang berarti terjadi hubungan yang negatif antara Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Dana Alokasi Umum (Y). Jika terjadi peningkatan satu unit pada Pendapatan Asli Daerah (X_2) akan mengurangi nilai Dana Alokasi Umum (Y) sebesar 2.745.

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t-statistik (uji parsial) merupakan salah satu uji signifikansi dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing varianel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial). Jika nilai p-value < 0,05, maka variabel tersebut dianggap berpengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya, jika p-value > 0,05, maka tidak signifikan.

- 1) Apabila nilai thitung > ttabel atau probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai thitung < ttabel atau probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6

Hasil Uji T

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1235.082	83.575	14.778	.000
	Pajak Daerah	3.298	.593	1.777	5.563
	Pendapatan Asli Daerah	-2.745	.543	-1.614	-5.054

a. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 4.6 terkait dengan uji t atau uji parsial didapat hasil:

- a) Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel Pajak Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum (Y) di Provinsi Lampung selama periode 2017–2024.
- b) Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum (Y) di Provinsi Lampung selama periode 2017–2024.

b. Uji F

Uji F (Uji Simultan) merupakan uji dalam regresi yang digunakan untuk mengetahui seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika p-value $< 0,05$ maka model dianggap berpengaruh secara signifikan secara simultan.

Tabel 4.7
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum Squares	of Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1534794.965	2	767397.483	15.504	.000 ^b
	Residual	1831368.072	37	49496.434		
	Total	3366163.037	39			

a. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil analisis menunjukan bahwa H_0 di tolak dan H_3 diterima. Jadi Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) secara simultan terdapat pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (Y) di Provinsi Lampung selama periode 2017–2024.

c. Uji Determinasi (R2)

Uji Koefisien Determinasi (R2) merupakan uji dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar proporsi variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Determinasi (R2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.456	.427	222.47794

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai *R square* (koefesien determinasi) sebesar 0,456 berarti secara simultan variabel Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (Y) di Provinsi Lampung selama periode 2017–2024 sebesar 45.6%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum

Teori Hessel Nogi S. menyebutkan bahwa kemandirian daerah dipengaruhi oleh kemampuan dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara terencana. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dari kemampuan keuangan suatu daerah dan tingkat ketergantungan terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Pada tabel Uji T di atas, terkait variabel Pajak Daerah terhadap Dana Alokasi Umum memberikan hasil yaitu variabel Pajak Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Dana Alokasi Umum. Dengan ini, kemandirian keuangan suatu daerah sangat disokong oleh pajak daerah sebagai komponen utama dalam PAD. Artinya, kontribusi pajak daerah yang mampu dihimpun oleh pemerintah

daerah sangat penting untuk mendukung kemandirian keuangan suatu daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Choirul Khasanah dan Lantip Susilowati bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah¹.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berada di dalam wilayah sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan sumber penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah². Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan, serta pelayanan publik tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Pada tabel Uji T di atas, terkait variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum memberikan hasil yaitu variabel PAD memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa dan H_2 diterima, yang berarti ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum. Sehingga jika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka suatu daerah tersebut bisa dikatakan sudah mandiri dan tidak bergantung pada Dana Alokasi Umum

¹ Putri Choirul Khasanah and Lantip Susilowati, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023” 5, no. 2 (2025): 747–58.

² Zuni Miftakhur and Lailatus, “Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD,” hal 29.

sebagai salah satu sumber pendanaan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida, Elmi Oktavia bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah³.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. Kemudian, pajak daerah yang tinggi memungkinkan suatu daerah mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan Uji F di atas, diperoleh nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_3 diterima, yaitu variabel Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) secara simultan terdapat pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (Y) di Provinsi Lampung selama periode 2017–2024.

Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap besaran penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septya

³ Puguh Setiawan et al., “Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016,” *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 44–53, <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>.

Nurrahmadani, Hariyati, dan Armiani bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah⁴.

⁴ Septya Nurrahmadani, “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” 21, no. 2 (2024): 162–79.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan tentang pengaruh Pajak Daerah Tingkat II dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi umum, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Tingkat II berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung selama periode 2017–2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah Tingkat II mempengaruhi besaran nilai Dana Alokasi Umum yang diterima.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum di Provins Lampung selama periode 2017-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besaran nilai Dana Alokasi Umum yang diterima.
3. Pajak Daerah Tingkat II dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung selama periode 2017-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah Tingkat II dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besaran nilai Dana Alokasi Umum yang diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal suatu daerah dan memastikan bahwa dana alokasi umum maupun khusus digunakan secara efisien melalui transparansi pengelolaan dana.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menyempurnakan hasil penelitian ini, seperti menambahkan periode dan mempertimbangkan penambahan variabel yang tidak ada dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Angreany. “Erhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di,” n.d., 2.
- Daerah, Pengaruh Pajak, D A N Dak, Pemda Di, and Provinsi Riau. “Pengaruh Pajak Daerah, Dbh, Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda Di Provinsi Riau 1,2,3” 5 (2024): 38–56.
- Dewantoro, Dimas Ariyo. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” 1, no. 2 (2022): 38–47.
- Furi Puspita, Ayu, Dewi Pusposari, and M Khoiru. *Lokal Taxing Power: Potensi, Pemeriksaan, Dan Penagihan*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Undip, 2018.
- Haryanto, Joko Tri. “Kebijakan Strategis Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa 2016.,” n.d.
- Khasanah, Putri Choirul, and Lantip Susilowati. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023” 5, no. 2 (2025): 747–58.
- Malau, Eve Ida, Eka Pratiwi, and Septania Parapat. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal” 3 (2020): 332–37. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>.
- Miftakhur, Zuni, and Lailatur. *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD*, n.d.
- Miftakhur, Zuni, and Lailatus. “Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD,” n.d., hal 29.
- Novianti, Dian. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung” 2, no. 3 (2022): 244–50.
- Nurrahmadani, Septya. “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” 21, no. 2 (2024): 162–79.

Oktavia, Bella Rafti, and Abdul Rohman. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten." *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 1 (2024): 1–15. <http://ejournals.s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Pianda, Dianda. *Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Priastama. *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Statr Up, 2017.

Priyatno. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. ANDI, 2017.

Setiawan, Puguh, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida Nurhaida, and Elmi Oktavia. "Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016." *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2020.

Titi Handayani, Luh, and Asmuji. *Statistik Deskriptif*. UM Jember Press, 2023.

[UU]. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

[UU]. (2009). Undang-Undang No 28 Tentang Pajak Daerah

[UU]. (2004). Undang-Undang No 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pusat dan Daerah

[UU]. (2009). Undang-Undang No 16 Tentang Definisi Pajak

[UU]. (2009). Undang-Undang No 28 Tentang Objek Pajak Restoran

[PERDA]. (2021) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Mentah E-Views

No	Nama Daerah	Tahun	Keterangan		
			Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
1	Bandar Lampung	2017	373.76	612.81	1034.73
		2018	398.45	550.28	1034.73
		2019	480.42	627.3	1114.93
		2020	410.46	537.54	1019.03
		2021	416.92	564.29	1002.21
		2022	498.95	645.97	1002.21
		2023	498.4	636.99	1085.65
		2024	555.82	621.28	1131.09
2	Lampung Selatan	2017	78.13	206.06	1013.33
		2018	91.96	215.41	1019.21
		2019	117.85	275.46	1054.04
		2020	116.02	275.14	966.26
		2021	135.1	295.72	947.73
		2022	160.86	310.58	947.73
		2023	155.83	319.7	1023.51
		2024	190.4	144.68	1111.44
3	Metro	2017	18.21	138.84	455.73
		2018	21.73	132.2	455.73
		2019	27.21	176.2	476.74
		2020	28.85	221.65	435.05
		2021	33.11	273.85	427.59
		2022	36.72	239.84	427.59
		2023	38.45	262.96	446
		2024	41.39	332.11	465.02
4	Lampung Tengah	2017	63.6	147.05	1317.68
		2018	79.71	165.41	1319.48
		2019	92.62	193.63	1385.75
		2020	85.42	179.88	1248.69
		2021	100.69	234.89	1233.41
		2022	119.66	212.02	1233.94
		2023	118.36	210.81	1335.97
		2024	136.4	168.97	1445.83
5	Lampung Timur	2017	39.72	111.89	1062.56
		2018	53.21	125.04	1069.17

No	Nama Daerah	Tahun	Keterangan		
			Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
		2019	62.33	147.53	1106.58
		2020	60.59	157.81	1007.07
		2021	66.99	158.38	996.51
		2022	75.05	195.57	996.89
		2023	77.98	181.49	1077.27
		2024	83.55	44.66	1168.26

Lampiran 2. Realisasi PAD Tertinggi di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	612,81	550,28	627,30	537,54	564,29	645,97	636,99	621,28
Lampung Selatan	206,06	215,41	275,46	275,14	295,72	310,58	319,70	144,68
Metro	138,84	132,20	176,20	221,65	273,85	239,84	262,96	332,11
Lampung Tengah	147,05	165,41	193,63	179,88	234,89	212,02	210,81	168,97
Lampung Timur	111,89	125,04	147,53	157,81	158,38	195,57	181,49	44,66

Lampiran 3. Realisasi Pajak Daerah Tingkat II di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	373,76	398,45	480,42	410,46	416,92	498,95	498,40	555,82
Lampung Selatan	78,13	91,96	117,85	116,02	135,10	160,86	155,83	190,40
Metro	18,21	21,73	27,21	28,85	33,11	36,72	38,45	41,39
Lampung Tengah	63,60	79,71	92,62	85,42	100,69	119,66	118,36	136,40
Lampung Timur	39,72	53,21	62,33	60,59	66,99	75,05	77,98	83,55

Lampiran 4. Realisasi Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	1034,73	1034,73	1114,93	1019,03	1002,21	1002,21	1085,65	1131,09
Lampung Selatan	1013,33	1019,21	1054,04	966,26	947,73	947,73	1023,51	1111,44
Metro	455,73	455,73	476,74	435,05	427,59	427,59	446,00	465,02
Lampung Tengah	1317,68	1319,48	1385,75	1248,69	1233,41	1233,94	1335,97	1445,83
Lampung Timur	1062,56	1069,17	1106,58	1007,07	996,51	996,89	1077,27	1168,26

Lampiran 5. Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov

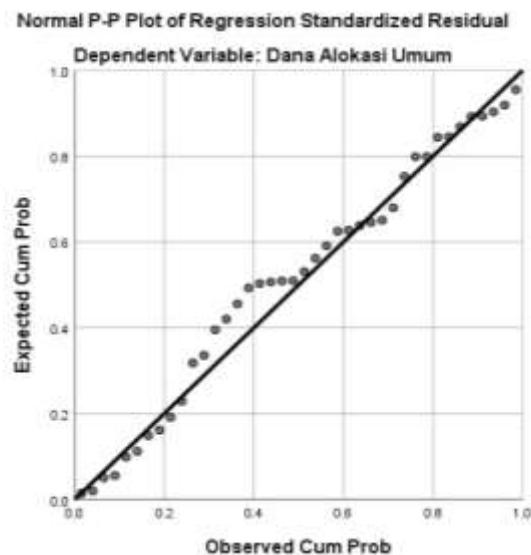
Keterangan		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		40
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	216.69830570
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.118
	<i>Positive</i>	.051
	<i>Negative</i>	-.118
<i>Test Statistic</i>		.118
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.175 ^c

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

Lampiran 6. Uji Normalitas Probability Plot



Lampiran 7. Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
1	Pajak Daerah	.144	6.938
	Pendapatan Asli Daerah	.144	6.938

a. *Dependent Variable: Dana Alokasi Umum*

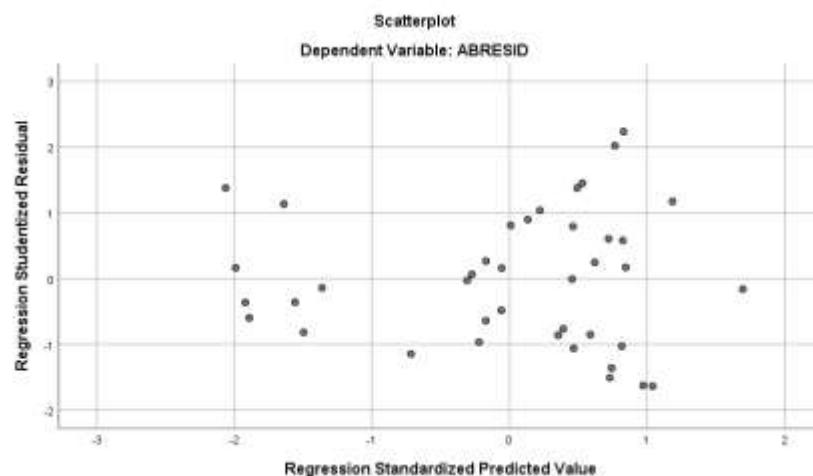
Lampiran 8. Uji Auto Korelasi

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
Test Value ^a	376.66746 ^b
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	1
Total Cases	40
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Mode

b. There are multiple modes. The mode with the largest data value is used.

Lampiran 9. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 10. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1235.082	83.575			14.778	.000
	Pajak Daerah	3.298	.593	1.777		5.563	.000
	Pendapatan Asli Daerah	-2.745	.543	-1.614		-5.054	.000

a. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

Lampiran 11. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1235.082	83.575	14.778	.000
	Pajak Daerah	3.298	.593	5.563	.000
	Pendapatan Asli Daerah	-2.745	.543	-1.614	.054

a. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

Lampiran 12. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1534794.965	2	767397.483	15.504	.000 ^b
	Residual	1831368.072	37	49496.434		
	Total	3366163.037	39			

a. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Lampiran 13. Uji Determinasi (R2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.456	.427	222.47794

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Dana Alokasi Umum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Winda Nur Afrita
NPM : 2003031051

Prodi/Fakultas : AKS/FEBI
Semester/TA : XI /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/10/2025 10	Perini lokasi penelitian Gunaikan teori pada bab 2 di Pembahasan	

Dosen Pembimbing

Carmidah, M.Ak.
NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ysb

Winda Nur Afrita
NPM. 2003031051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Winda Nur Afrita
NPM : 2003031051

Prodi/Fakultas : AKS/FEBI
Semester/TA : XI /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/10/2025	Kaitkan pembahasan dengan teori pada bab 2	

Dosen Pembimbing

Carmidah, M.Ak.
NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ysb

Winda Nur Afrita
NPM. 2003031051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Winda Nur Afrita
NPM : 2003031051

Prodi/Fakultas : AKS/FEBI
Semester/TA : XI /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12/2025	art untuk sida angkatan	

Dosen Pembimbing

Carmidah, M.Ak.
NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ysb

Winda Nur Afrita
NPM. 2003031051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Inggmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Winda Nur Afrita
NPM : 2003031051
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pengaruh Pajak Daerah Tingkat II Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2025
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-958/Un.36/S.U.1/OT.01/12/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WINDA NUR AFRITA
NPM : 2003031051
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2003031051.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas
administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Winda Nur Afrita dilahirkan di Bumi Harjo hari Jumat tanggal 05 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan ayahanda Hermili berprofesi sebagai petani dan ibunda Endang Supatmi sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 6 Metro Timur tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Metro tamat pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan pada SMK Negeri 1 Metro tamat pada tahun 2020, lanjut ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung pada tahun 2020.

Selain mengikuti aktifitas kuliah di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, penulis juga aktif terlibat dalam kegiatan organisasi baik intra maupun ekstra kampus sebagai bekal pengalaman bermasyarakat. Perjalanan dan pengalaman organisasi intra kampus yang sempat penulis ikuti adalah sebagai Ketua Umum HMJ Prodi Akuntansi Syariah. Sedangkan di organisasi ekstra kampus, penulis aktif sebagai kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Sekretaris Rayon AKS tahun 2022-2023, Ketua Kopri Komisariat Jurai Siwo Metro tahun 2024-2025.

Demikian riwayat hidup penulis paparkan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam kebaikan amin.